

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian pemerintah di Negara manapun terutama di Negara sedang berkembang seperti Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang besar, kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Persoalan kemiskinan juga dapat dipicu karena rendahnya kualitas hidup manusia, upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, dan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Tingkat Kemiskinan merupakan presentase jumlah (angka) Kemiskinan terhadap penduduk yang tidak terpenuhi dalam kebutuhan dasar, kemiskinan telah membatasi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai manusia untuk memperoleh akses kebutuhan hidup. Masalah kemiskinan memiliki banyak dimensi seperti halnya dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dimensi sosial berhubungan dengan stratifikasi sosial atau pembedaan lapisan masyarakat antara yang kaya dan miskin, sedangkan dimensi ekonomi berhubungan dengan pendapatan individu dan perekonomian suatu Negara. Menurut Badan Pusat Statistik (2010:13) kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan atau yang bukan makanan, dapat diukur dari segi pengeluaran. Ada beberapa penyebab kemiskinan menurut jenisnya yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena struktur yang membuat sebagian kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana tentang ekonomi, social, politik, dan juga budaya. Kemiskinan kultural terindikasi dalam perilaku hidup boros , tingkat tabungan rendah, serta adanya sikap menerima atau pasrah terhadap lingkungan kemiskinan. Di Indonesia tidaklah sedikit penduduk miskin yang disebabkan oleh budaya mereka sendiri, sehingga hal ini menyebabkan setiap tahun tingkat penduduk miskin cenderung naik.

Makna kemiskinan menurut Suparlan (2004:31) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan

mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah- masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. (www.bappenas.go.id)

Negara-negara berkembang pada umumnya sedang berusaha untuk mengembangkan dirinya daari suatu keadaan dan sifat masyarakat tradisional dengan keadaan ekonomi terbelakang, menuju ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Paling sedikit apabila hal ini menyangkut ekonomi, ditujukan ke arah mendapatkan kesejahteraan dan tingkat ekonomi yang lebih baik. Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk menunjang perubahan dan kemajuan ekonomi dan membantu kesempatan lebih besar untuk memecahkan berbagai masalah sosial. Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan mengalami pola yang menurun.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Bappeda Jawa Tengah (2007:16), upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut "*Grand Strategy*". Pertama, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Ketiga, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, dilakukan untuk

memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas.

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu masalah pengupahan, adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sering dikaitkan oleh ketrampilan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pelatihan serta pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan yang diterima masyarakat, apabila faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun (Soerya, 2001:11).

Tingkat Upah minimum Provinsi dijadikan sebagai dasar dalam penetapan upah minimum Kota/Kabupaten yang belum bisa menetapkan upah minimum daerahnya. Upah minimum di Provinsi Jawa Tengah dalam sepuluh tahun terakhir selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya seiring dengan

meningkatnya nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun adanya ketentuan kenaikan nilai upah minimum ini tetap saja jumlahnya harus di atas kebutuhan hidup layak masyarakat, ini artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih berkisar di atas jumlah upah minimum.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001:11). Lewis menyatakan tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukkan bagi Negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja, Lewis menganggap di Negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi sangat terbatas (Sukirno, 2006:9). Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, standar hidup yang rendah dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah. Tingkat pengangguran di Jawa Tengah cenderung menurun. Walaupun mengalami penurunan, adanya pengangguran harus segera diatasi oleh pemerintah sebelum bertambah serius dan berakibat pada peningkatan jumlah kemiskinan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas penduduk serta peningkatan sumber daya pangan akan menjadikan kemiskinan semakin meningkat. Adanya jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sejumlah manusia yang menempati suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan (income per capita) Negara tersebut, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian Negara tersebut (Subri, 2003:2). Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menurut Lincoln akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan yang baru sangat terbatas (Arsyad,2010:10).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2019 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding provinsi-provinsi lain di pulau jawa adalah yang paling tinggi. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan , padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah , sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi Provinsi Jawa Tengah baik di Kabupaten/Kota. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Upah Minimum Tingkat**

Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

4. Menganalisis pengaruh upah minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis sebagai syarat memperoleh gelar S1 Program studi Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.